

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dilihat dari aspek beban kerja tidak dapat terlepas dengan aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mampu menjabarkan terhadap tugas pokok sebagai fungsi pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan desa. Untuk itu kemampuan aparatur harus selalu ditingkatkan guna pencapaian pelayanan yang baik didasarkan pada mekanisme yang ada.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok (sub isu sesuai tupoksi)	Masalah (Indikator tujuan)	Akar Masalah (semua indikator program terbaru)
1	Nilai IDM Kabupaten Pati masih rendah, khususnya di indeks ketahanan ekonomi.	1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan.	Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
2	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di atas 50%.	2. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Sistem pendataan profil desa / kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa / kelurahan belum optimal.

3	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat rendah, dibawah 5%. Hal ini mengindikasikan lunturnya nilai-nilai kegotongroyongan, sehingga potensial menimbulkan permasalahan lebih lanjut dalam menghadapi tuntutan desa mandiri.	3. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan.	Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan pedesaan masih rendah.
		4. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.	Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat melalui pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) masih rendah.
		5. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa.	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pedesaan masih rendah.
		6. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa.	Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah.
		7. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi pedesaan.	Pemasyarakatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.

		8. Kurangnya koordinasi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan.	Sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa / kelurahan belum optimal.

3.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 sebagaimana berikut :

Visi : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.

Misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Berkaitan dengan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebagai pelaksana

pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, mendorong tercapainya visi dengan melaksanakan misi ke-3.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati untuk melaksanakan tugas tersebut melalui :

1. Pemberian bantuan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Pembinaan desa / kelurahan dalam peningkatan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan skala prioritas.
4. Peningkatan fungsi kelembagaan di desa.
5. Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Adapun untuk program pendukung pelaksanaan misi tersebut adalah :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi desa.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
5. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.
6. Program penguatan fungsi kelembagaan pemerintah desa yang efektif dan efisien.
7. Program penanggulangan kemiskinan penduduk.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI.

1. Telaahan Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden 31 No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan visi pembangunan nasional, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yaitu:

- a. Sasaran Makro (Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Ekonomi Makro);
- b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pendidikan; Kesehatan; Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Pembangunan Masyarakat);
- c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Maritim dan Kelautan; Pariwisata dan Industri Manufaktur; Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas);
- d. Sasaran Dimensi Pemerataan (Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; Meningkatkan cakupan pelayanan dasar

dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);

- e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah (Pemerataan Pembangunan Antarwilayah);
- f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Politik dan Demokrasi; Penegakan Hukum; Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah; Pertahanan dan Keamanan).

Sesuai Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tercantum di dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Berikut Program yang ada pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi :

1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu.
4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal.
5. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.
6. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1. Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: **“Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa”**.

Renstra Dispermades Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Hal ini dapat dilihat pada indikator Kinerja Utama Dispermades Kabupaten Pati yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun, untuk Kabupaten Pati saat ini memiliki indeks angka sebesar 0,624, dengan pencapaian angka sebesar itu Kabupaten Pati masuk dalam klasifikasi “Desa Berkembang”. Dan sampai dengan akhir periode

Renstra di tahun 2022 ditargetkan angka indeks sebesar 0,685 – 0,700 atau masuk dalam klasifikasi rata-rata Desa Maju.

Capaian kinerja Renstra Dispermades Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dispermades Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.

2. Telaah Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta mempunyai fungsi pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumberdaya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, social budaya masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kesekretariatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tahun 2013-2018, Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Di dalam Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, tertuang visi Gubernur Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mendatang, yaitu:

" Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"."

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) misi yang merupakan penjabaran operasionalnya, yaitu:

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
- d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah di atas, Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang dapat dijabarkan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;

Tujuan: Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengalaman ajaran Tri Sakti Bung Karno

Sasaran: meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya ajaran Tri Sakti Bung Karno.

- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

Tujuan: Menurunkan jumlah penduduk miskin, mewujudkan desa mandiri/berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energy dan meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan.

Sasaran: Menurunnya angka kemiskinan, terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan local dan meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan

- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;

Tujuan: meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan.

Sasaran: meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan

- d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
Tujuan: Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.
Sasaran: Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.
- e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
Tujuan: Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Sasaran: meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman.
Sasaran: menurunnya angka kematian dan angka kesakitan; dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni.
- g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Tujuan: meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
Sasaran: meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pati adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di Wilayah Kabupaten Pati yang disusun untuk menjaga keserasian

pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Tujuan penilaian ruang wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara tidak langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati untuk mendukung semua kebijakan dan strategi penataan ruang.

Terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ikut bertanggung jawab dalam penataan permukiman perdesaan dengan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati selama kurun waktu 4 tahun yang akan datang menargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Beberapa program pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam yaitu Program Teknologi Tepat Guna (TTG), pemanfaatn dan pengelolaan sumber daya alam berbassi masyarakat. Program-program tersebut berorientasi pada pemnfaatan dan pelestarian sumberdaya alam, oleh karena itu program pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Pati tidak menimbulkan dampak lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU TRATEGIS.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang jelas diuraikan sebelumnya, maka dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan

lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut :

1) Kekuatan Internal (*Strenght*).

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (Aparatur) yang berpendidikan memadai.
- Sumber daya alam yang cukup potensial.
- Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
- Tersedianya kendaraan dinas yang memadai.
- Dukungan pimpinan dalam memegang komitmen untuk pelaksanaan tugas.

2) Kelemahan Internal (*Weakness*).

- Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang profesional.
- Masih kurangnya aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas.
- Masih terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan terkait bidang pemberdayaan.
- Ruangan gedung yang kurang memadai.
- Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor.
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin.

Terhadap permasalahan dan isu-isu sebagaimana dipaparkan diatas, dengan menggunakan 4 faktor SWOT, maka disusun strategi bidang dari ke-empat factor tersebut sebagai berikut :

- 1) Strategi S – O (Memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengoptimal-kan peluang yang ada).

- a) Mengotimalkan karyawan yang ada agar dapat bekerja secara efektif sesuai ketentuan pedoman teknis.
 - b) Optimalisasi karyawan melalui rapat-rapat dan pelatihan serta koordinasi yang intensif.
 - c) Optimalisasi karyawan untuk menggali ide-ide dan memanfaatkan SDA yang ada di desa dengan tanpa merusak lingkungan
- 2) Strategi W – O (Memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi kelebihan).
- a) Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intens.
 - b) In house training untuk meningkatkan kapasitas karyawan.
 - c) Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program pemberdayaan masyarakat.
 - d) Memanfaatkan dana desa untuk program penanggulangan kemiskinan
- 3) Strategi W – T (Mengatasi kelemahan dan mengeliminasi ancaman yang timbul).
- a) Koordinasi yang intensif lintas bidang dan lintas sektoral.
 - b) Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa melalui pelatihan-pelatihan.
- 4) Strategi S – T (Memanfaatkan seluruh kekuatan dalam menanggulangi ancaman).
- a) Memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada untuk memobilisasi pemberdayaan masyarakat.
 - b) Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat tim.

